

Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)

Fauzi Arif Lubis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
lubisfauziarif@gmail.com

Abstract

The problem in this research focused on the three aspects, that is: (1) how the customer characteristics which is the empowerment object of BMT Mitra Simalem Al Karomah, (2) empowering forms of what is being done by BMT Mitra Simalem Al Karomah, and (3) how the results of such empowerment. This research is a field research with qualitative approach. The results of this research shows that the customer characteristics of BMT Mitra Simalem Al Karomah can be seen in three aspects, that is: (1) aspects of religion, (2) aspects of business and other work groups, and (3) aspects of the economic level. The economic empowerment that BMT Mitra Simalem Al Karomah done through the financing realization. Other forms of empowerment that supports are: founding, training and social activities. The research shows that empowerment is successfully done with an indicator of economic development clients and customers active participation which is the object of empowerment. So Empowerment on the social aspects has made the existence of this BMT is quite popular among the public, especially in the District Berastagi and Kabanjahe. Empowerment that performed by BMT Mitra Simalem Al Karomah deemed successful characterized by an increased level of customers economy and the active participation of customers.

Keyword: empowerment, forms, goals

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek, yaitu: (1) bagaimana karakteristik pelanggan yang merupakan objek pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah, (2) memberdayakan bentuk apa yang sedang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah, dan (3) bagaimana hasil pemberdayaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pelanggan BMT Mitra Simalem Al Karomah dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu: (1) aspek agama, (2) aspek bisnis dan kelompok kerja lainnya, dan (3) aspek tingkat ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang BMT Mitra Simalem Al Karomah dilakukan melalui realisasi pembiayaan. Bentuk lain dari pemberdayaan yang mendukung adalah: pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berhasil dilakukan dengan indikator klien pembangunan ekonomi dan pelanggan partisipasi aktif yang merupakan objek pemberdayaan. Jadi Pemberdayaan pada aspek sosial telah membuat keberadaan BMT ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya di Berastagi Kabupaten dan Kabanjahe. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra

Simalem Al Karomah dianggap berhasil ditandai dengan peningkatan tingkat pelanggan ekonomi dan partisipasi aktif dari pelanggan.

Kata Kunci: pemberdayaan, bentuk, tujuan

Pendahuluan

Keberadaan BMT Mitra Simalem Al Karomah yang berpusat di Kecamatan Berastagi dan Kabanjahe, Kabupaten Karo, akan menjadi perbincangan menarik jika dilihat dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang, keberadaan BMT sebagai *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat bukanlah kajian yang unik karena sudah cukup banyak hasil kajian yang membahas kondisi tersebut. Namun demikian, situasinya tentu akan berbeda ketika BMT Mitra Simalem Al Karomah yang diketahui beroperasi pada kawasan mayoritas Kristen dijadikan sebagai objek kajian. Jika BMT benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan, bisa diasumsikan bahwa pemberdayaan yang diselenggarakan BMT Mitra Simalem Al Karomah akan menyentuh objek pemberdayaan tidak saja dari kalangan masyarakat Islam, tapi termasuk juga masyarakat dari kalangan Kristen sebagai pemeluk agama yang mendominasi wilayah Kabupaten Karo. Asumsi ini bisa dibenarkan dengan dasar tidak adanya pembatasan bagi BMT sebagai lembaga keuangan Islam untuk menjaring nasabah dari kalangan agama tertentu sejauh nasabah terkait memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT bersangkutan.

Sebagaimana dalam konsep ideal, BMT memang harus menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi sebagai tanggung jawab sosialnya menjadi lembaga keuangan mikro (*microfinance*). Jika dilihat dalam konteks sejarah, kelahiran lembaga keuangan mikro seperti BMT dilatarbelakangi oleh keterbatasan masyarakat lapis bawah untuk mengakses modal sebagai penguatan perekonomiannya. Fakta yang seringkali ditemukan adalah, lembaga keuangan seperti bank tidak mampu memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat lapis bawah oleh karena keterbatasannya untuk membuka jaringan di daerah-daerah pelosok. Dalam hal ini, koperasi—termasuk di dalamnya BMT—kemudian ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain keterbatasan bank menjangkau masyarakat lapis bawah, pada sisi sebaliknya, di kalangan masyarakat lapis bawah juga mengalami kesulitan akses modal bukan karena tidak terjangkaunya keberadaan bank, namun demikian ada semacam prosedur yang

sulit dipenuhi oleh mereka sehingga memilih koperasi semisal BMT untuk dijadikan sebagai sumber modal menjadi alternatif yang lain bagi mereka (Su'ud: 2007. h. 73).

Konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat lapis bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dengan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers: 1983. h. 13).

Pada dasarnya, konsepsi pemberdayaan dan latar belakang lahirnya lembaga keuangan Islam seperti BMT sendiri memiliki ‘benang merah’ yang cukup jelas. Lahirnya BMT didorong oleh kenyataan bahwa keberadaan perbankan syariah cenderung berpusat di tengah masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha-usaha golongan menengah ke atas, padahal pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) kebanyakan berada di pinggiran kota dan desa yang memiliki usaha relatif kecil dan terbatas sehingga mengalami kesulitan akses modal (Ridwan: 2004. h. 53). Titik mula lahirnya BMT dilatarbelakangi oleh kebutuhan umat Islam akan pengembangan sistem perekonomian Islam di Indonesia. Ekonomi Islam sendiri dianggap sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung diidentifikasi sebagai ekonomi kapitalis dan dalam banyak hal sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Oleh karena itu setidaknya ada beberapa aspek penting yang harus dilihat dalam keberhasilan BMT Mitra Simalem Al Karomah, yaitu: *pertama*, konsepsi pemberdayaan yang dilakukan BMT sehingga mampu eksis di tengah masyarakat Kabupaten Karo yang mayoritas beragama Kristen; *kedua*, karakteristik nasabah yang secara otomatis dapat diposisikan sebagai objek pemberdayaan; dan *ketiga*, hasil terukur dari pemberdayaan yang dilakukan BMT Mitra Simalem Al Karomah dengan melihat tingkat perkembangan ekonomi nasabahnya. Berdasarkan beberapa aspek tersebut, dirumuskan sebuah konsep penelitian tentang keberadaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dalam pemberdayaan ekonomi nasabah di Kecamatan Berastagi—Kabanjahe Kabupaten Karo.

Kajian Teoritis

1. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Secara etimologi, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terambil dari dua kata yang berbeda, yaitu: *Bayt al Ma>l* (rumah uang) dan *Bayt al Tamwil* (rumah pembiayaan). Jika dimaknai secara bebas pengertian BMT yang tersusun dari dua kata sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan (dimaknai dari kata rumah uang) dan peminjaman uang (dimaknai dari kata rumah pembiayaan). Dengan pengertian tersebut, BMT pada dasarnya merupakan bentuk lain dari lembaga keuangan perbankan pada umumnya.

Sementara itu, dari sudut terminologi, BTM bisa dimaknai dengan beberapa pengertian berikut ini:

- a. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan ekonomi sistem syariah.
- b. Dilihat dari makna *Bayt al Ma>l*, BMT bisa dimaknai sebagai lembaga penerima titipan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dilihat dari makna *Bayt al Tamwil*, BMT bisa dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Aziz: 2006. h. 2).

Dari segi hukum, BMT mengambil bentuk koperasi dengan prakarsa sendiri, sebab desakan kebutuhan praktis untuk memperoleh payung hukum peraturan tentang BMT memang belum ada. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (lembaga keuangan mikro syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan di dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

2. Konsep Ekonomi Islam Melalui BMT

Melekatnya terminologi syariah pada keberadaan BMT mengisyaratkan bahwa kehadiran BMT secara otomatis telah memasyarakatkan konsep ekonomi Islam pada tempat di mana ia berada. Kerangka dasar dari lembaga keuangan Islam sendiri merupakan serangkaian aturan main yang secara keseluruhan berdasarkan syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek budaya pada masyarakat Islam. Syariah adalah hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah (Ariff: 1988). Zamir menambahkan prinsip-prinsip dalam lembaga keuangan syariah, antara lain: (1) melarang adanya bunga (*interest*); (2) pembagian resiko (*risk sharing*); (3) uang sebagai modal potensial; (4) melarang adanya unsur spekulatif; (5) kebenaran dari sebuah kontrak; dan (6) melakukan aktifitas sesuai syariah (Zamir: 1997).

Penerapan sistem keuangan syariah sebagai wujud dari sistem ekonomi Islam itu sendiri pada BMT bisa dilihat melalui pelayanan yang disediakannya. Pelayanan yang disediakan BMT secara umum bisa dikategorikan kepada tiga, yaitu: sistem jual beli, sistem bagi hasil dan sistem jasa. Masing-masing layanan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut (Perwataatmadja: 1996: 168-169):

- a. Sistem jual beli. Terdiri dari: (a) *bait bitsaman ajil*, merupakan penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur; (b) *murabahah*, merupakan penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo (sekaligus); (c) *bai as salam*, merupakan penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria tertentu yang sudah umum, anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah jadi); (d) *Istishna* penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan/setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus/mengangsur; (e) *ijarah*, merupakan pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.

Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).

- b. Sistem bagi hasil, terdiri dari: (a) *musyarakah*, merupakan kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu; (b) *mudharabah*, merupakan pemberian modal kepada anggota yang mempunyai *skill* untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya, pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Sistem jasa, terdiri atas: (a) *qardh*, merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai; (b) *al wakalah*, merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu, penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama; (c) *al hawalah*, merupakan penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, BMT sebagai penerima pengalihan hutang/piutang akan mendapatkan imbalan dari pengaturan pengalihan (*management fee*); (d) *rahn*, merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*)

ditanggung oleh penggadai (*rahin*), barang jaminan adalah milik sendiri (*rahin*), untuk itu hendaknya *rahin* bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan; (e) *kafalah*, merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain, BMT mendapatkan imbalan dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.

Unsur-unsur ekonomi Islam pada BMT juga bisa dilihat dari bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat yang bergantung pada dua jenis akad, yaitu: perserikatan usaha (*musyarakah*) dan jual beli (*bai*). Berdasarkan kedua akad tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah: pembiayaan *bai bitsaman ajil* (BBA); pembiayaan *murabahah* (MBA); pembiayaan *mudharabah* (MDA); pembiayaan *musyarakah* (MSA); dan pembiayaan *al qardh al hasan* (Ridwan: 2004, 126).

BMT tidak dapat hanya sekadar menyalurkan uang melainkan syariah harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

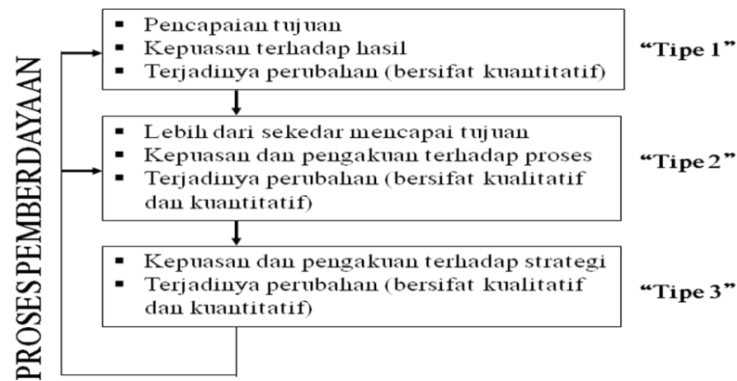
3. Konsep Pemberdayaan pada BMT

Pada bagian-bagian terdahulu pernah disinggung bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai sebuah antitesa terhadap model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Secara empirik, latar belakang historis yang melahirkan konsep pemberdayaan muncul akibat format sosial ekonomi yang dikotomis yang terbangun dengan kerangka logik, antara lain: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan pada item pertama akan melahirkan masyarakat pekerja dan pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, politik, hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan memberikan legitimasi; dan (4) kooptasi dari bangunan sistem tersebut akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu: masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya (Projono dan Pranaka: 2009. h. 269). Ada berbagai cara pandang yang dikemukakan sejumlah ahli dalam memahami makna pemberdayaan. Mengutip David Clutterbuck, pemberdayaan dipahami sebagai

upaya mendorong dan memberikan individu kesempatan untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam meningkatkan cara melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai tujuan organisasi (Susan: 1999. h. 13). Sementara Jan Carlzon sebagaimana dikutip dalam Sarah Cook dan Steve Macaulay, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberinya kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya (Sarah: 1996).

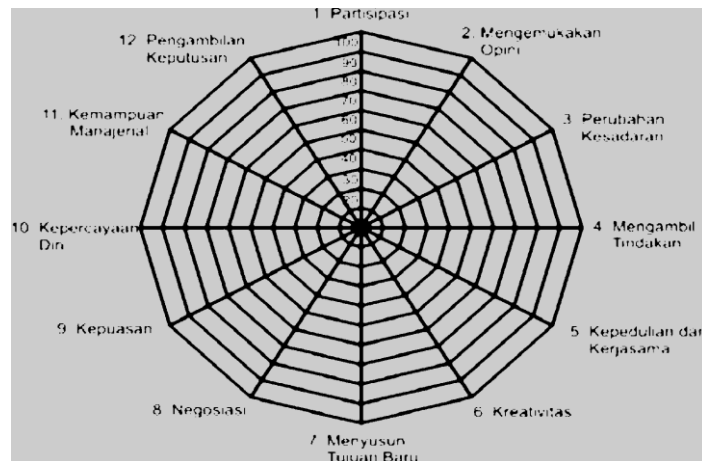
Ide pemberdayaan sendiri memiliki dua kecenderungan jika dilihat dari sudut operasionalisasinya. *Pertama*, kecenderungan primer, merupakan kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu untuk lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat: 1999). Jika dilihat partisipasi sebagai salah satu komponen penting pada proses pemberdayaan, maka bisa dipahami bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok (kolektif). Namun demikian, seperti ditegaskan Freidmann, karena proses pemberdayaan merupakan proses dari wujud perubahan sosial atau status hierarki yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Freidmeann: 1993, 3).

Fujikake mengembangkan beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi pemberdayaan. Setidaknya ada tiga tahap yang cukup penting dikemukakan di sini (Fujikake: 2007, 25-37). *Tahap pertama*, dengan melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya. Hasil dari analisis mengenai perubahan tingkat kesadaran ini bisa dituangkan dalam grafik yang menggambarkan tingkat perubahan kesadaran yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: sangat baik, telah berubah dan tidak seperti sebelumnya. Tahap ini bisa digambarkan melalui skema berikut:



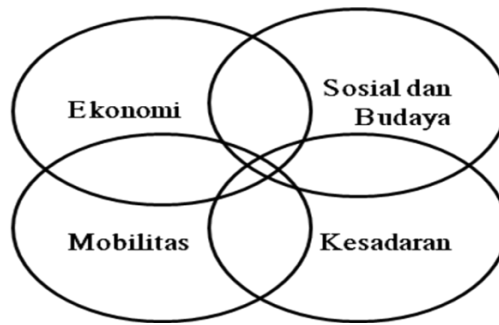
Gambar 2 Tiga tipe hasil pemberdayaan. Fujikake (2008).

Tahap kedua, menilai tanggapan masyarakat dan praktik pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap dua belas indikator yang merupakan *sub-project* dari proses pemberdayaan tersebut. Keduabelas indikator tersebut yaitu: tingkat partisipasi, pengemukakan opini, perubahan kesadaran, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan manajerial, dan pengumpulan keputusan. Tahap kedua ini bisa digambarkan melalui skema berikut:



Gambar 3 Skema evaluasi pemberdayaan dengan 12 indikator. Fujikake (2008).

Tahap ketiga, dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan antar indikator yang telah dianalisis pada model 2 pada tahap sebelumnya. Hasil analisis pada tahap ini adalah grafik keterkaitan antar elemen-elemen inti dalam pemberdayaan, yaitu ekonomi, sosial dan budaya serta kesadaran dan mobilitas. Tahap ketiga ini bisa digambarkan melalui skema berikut ini.



Gambar 4 Empat elemen inti pemberdayaan. Fujikake (2008).

Fujikake pada dasarnya memperkenalkan tahapan yang terakhir, namun demikian tahapan tersebut sesungguhnya merupakan pengukuran dari tingkatan pencapaian pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini Fujikake menggolongkan tingkatan pemberdayaan tersebut menjadi tiga, yaitu: *micro level* (desa), *meso level* (kota/wilayah), dan *macro level* (nasional). Kata kunci yang penting digarisbawahi dari keseluruhan tahapan tersebut sebenarnya diperlihatkan pada skema empat elemen inti pemberdayaan. Bahwa pemberdayaan tidak lain merupakan konsepsi dari penguatan perekonomian yang berpengaruh pada lingkungan sosial dan budaya yang menghendaki mobilitas melalui kesadaran individu maupun kelompok.

Tidak mudah memposisikan BMT sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi oleh karena keberadaannya di satu sisi merupakan sebuah lembaga profit yang berorientasi bisnis dan masih perlu memberdayakan dirinya sendiri di satu sisi, padahal di sisi yang lainnya, tanpa sadar pertumbuhan dan perkembangan BMT dirasakan sangat membantu perbaikan ekonomi masyarakat kecil sehingga bisa diorientasikan sebagai lembaga pemberdayaan. Bahkan, secara jujur harus diakui jika pemberdayaan ekonomi masyarakat ingin dilihat dalam arti yang sebenarnya, BMT pada dasarnya memainkan peranan penting, karena mulai dari pedagang kecil hingga menengah tidak sedikit menggantungkan harapan modalnya pada BMT.

Untuk melihat lebih jauh keberadaan BMT sebagai lembaga pemberdayaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan BMT sebagai salah satu bentuk yang khas dari koperasi. Sebab, BMT pada prinsipnya adalah koperasi itu sendiri, meskipun dalam mekanisme dan prinsip-prinsip pengelolaannya ditemukan sejumlah perbedaan signifikan dengan koperasi pada umumnya. Seperti yang juga telah ditegaskan pada deskripsi terdahulu, memang

tidak ada kategori yang lebih tepat selain koperasi untuk mengklasifikasikan sistem pengelolaan keuangan semacam BMT. Apalagi, BMT memang sudah memutuskan untuk menjadikan peraturan perundang-undangan koperasi sebagai payung hukumnya sehingga BMT harus tunduk dengan berbagai bentuk aturan yang diisyaratkan pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Persoalan lain yang cukup penting ditekankan sebelum melihat BMT sebagai lembaga pemberdayaan adalah, bahwa keberadaan *stakeholder* dengan masing-masing peranannya dalam ruang lingkup pemberdayaan itu sendiri merupakan unsur yang sangat penting dipertimbangkan. Dalam kaitan ini, BMT akan menjadi *stakeholder* yang memiliki pengaruh besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesimpulan ini bisa diambil dengan kembali memposisikan BMT sebagai lembaga koperasi yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai ‘jalan yang mendekatkan jurang perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin’ (Mubyarto: 1999, 10).

Koperasi juga dipandang sebagai salah satu lembaga pemberdayaan yang efektif dalam upaya pembangunan masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang menekankan sikap gotong royong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan (Burhanuddin: 2005).

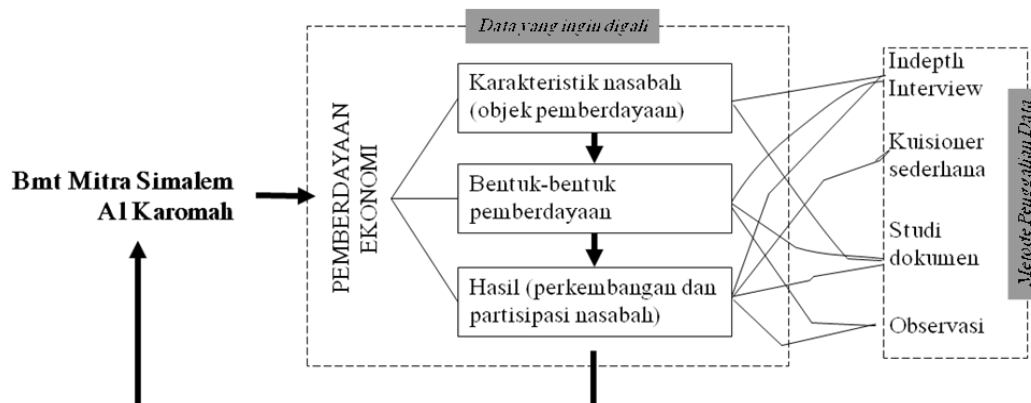
Pentingnya keberadaan koperasi sebagai *stakeholder* yang amat menentukan keberhasilan pemberdayaan, maka secara otomatis BMT akan masuk sebagai salah satu di dalamnya. Tapi, sebelum melihat kondisi tersebut lebih jauh, penting dikemukakan pandangan Fatturochman yang menyebutkan ada banyak kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan koperasi. Kondisi ini disebabkan antara lain: *pertama*, tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin karena program yang diterapkan berorientasi pada ‘belas kasihan’ sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai “dana bantuan cuma-cuma” dari pemerintah; *kedua*, asumsi yang dibangun lebih menekankan kebutuhan warga miskin terhadap modal, karenanya konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin sehingga bermula pada rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku warga miskin dan warga masyarakat lainnya dalam memahami akar kemiskinan; *ketiga*, program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah lebih dimaknai secara parsial yang hanya mengintervensi pada satu

aspek dan belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu (Faturrochman: 2007, 5).

Menyadari berbagai kelemahan tersebut, BMT sejatinya dapat mengambil peranan penting, sebagai lembaga keuangan alternatif. Sebagai lembaga keuangan alternatif, BMT dapat dimaknai sebagai lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, di mana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan. Selain itu, dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanannya BMT juga menjadi lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat amat dibutuhkan oleh pengusaha kecil mikro. Pembiayaan yang disalurkan BMT merupakan pembiayaan sektor riil berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan demikian, akan terjadi tanggung jawab sosial yang berlaku pada masing-masing *stakeholder* (BMT dan UKM) untuk penekanan keberhasilan usaha.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan kepada penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya mengumpulkan data-data lapangan didukung dengan berbagai informasi dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Perhatian penelitian dipusatkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu karakteristik nasabah yang menjadi objek pemberdayaan, bentuk-bentuk pemberdayaan, dan hasil pemberdayaan yang dilakukan BMT Mitra Simalem Al Karomah. Berdasarkan perhatian tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema kerangka pikir penelitian, data yang ingin digali dan metode penggalian data

Skema di atas mengabstraksikan sebuah kerangka pikir bahwa dengan mendistribusikan pemberdayaan pada objek yang diberdayakan, maka aspek-aspek vital yang pertama kali harus dilihat adalah karakteristik nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah untuk kemudian mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan. Setelah mendapati bentuk-bentuk tersebut, maka dapat diukur keberhasilan pemberdayaan baik dengan indikator perkembangan ekonomi maupun partisipasi nasabah terkait.

Dengan menggunakan kerangka pikir di atas, maka penelitian ini akan menggunakan paradigma kualitatif yang diarahkan pada makna penelitian kualitatif itu sendiri, dimana peneliti berupaya mengkonstruksi realitas yang ditemukan di lapangan untuk kemudian memberikan penafsiran pada maknanya (Jary: 1991. 513).

Aplikasi penggunaan penelitian kualitatif tersebut dijelaskan melalui Tabel di bawah ini.

Tabel 1 Aplikasi penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian.

Pokok Masalah	Indikator	Metode
Karakteristik nasabah	Individu/kelompok Latar belakang sosial ekonomi Jenis pekerjaan	Wawancara dan studi dokumen
Bentuk-bentuk pemberdayaan	Penguatan modal Pengembangan potensi nasabah Pengawasan ekonomi nasabah	Observasi, wawancara dan studi dokumen
Hasil pemberdayaan	Perkembangan ekonomi nasabah Partisipasi yang diberikan	Observasi, wawancara, kuesioner sederhana dan studi dokumen

Sumber data pada penelitian ini dikelompokkan kepada dua sumber, yaitu: sumber data pokok (primer) dan sumber data pendukung (sekunder). Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh berdasarkan penjelasan dan keterangan langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer terdiri dari dua,

yaitu unsur pimpinan dan pengurus yang berwenang di lingkungan BMT Mitra Simalem Al Karomah dan nasabah yang menjadi objek pemberdayaan. Sementara itu, sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain berupa informasi, literatur, serta dokumen yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono: 2009. h. 219). Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui empat cara, yaitu: 1) *In depth interview* (wawancara mendalam) dilakukan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpretensi menjawab permasalahan penelitian secara berulang-ulang kepada berbagai sumber hingga data dianggap jenuh. 2) Kuesioner sederhana yang dimaksudkan untuk sekedar mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari unsur pengelola BMT Mitra Simalem Al Karomah. Teknik kuesioner digunakan karena keinginan melihat lebih banyak tanggapan-tanggapan dari nasabah sebagai responden. 3) Observasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meninjau langsung situasi pada wilayah penelitian guna mengkonfrontir hasil wawancara terhadap kenyataan yang ditemukan di lapangan. 4) Studi literatur/dokumen dengan cara menelaah literatur dari berbagai sumber yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dokumen-dokumen terkait yang dimiliki BMT Mitra Simalem Al Karomah.

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data kualitatif disajikan secara deskriptif melalui empat tahap, sebagai berikut (Moleong: 2006. 247):

- b. Pengkategorian dan klasifikasi data. Pengkategorian merupakan upaya peneliti untuk menyeleksi data-data yang terkumpul, kemudian mentabulasikan data sesuai dengan tema-tema permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian yang dilakukan.

- c. Perbandingan data. Setelah data dikategorikan, peneliti akan melakukan perbandingan data untuk dapat menentukan kelayakan data yang perlu disajikan pada penelitian.
- d. Deskripsi data. Data-data yang telah mengalami proses seleksi data kemudian dideskripsikan secara verbal untuk data-data deskriptif, sementara data-data statistik akan disajikan ke dalam tabel dan angka.
- e. Penarikan kesimpulan. Setelah data-data dideskripsikan dan dianalisa dengan teknik kualitatif, hasil penyajian dan analisa data kemudian disimpulkan dengan teknik induktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

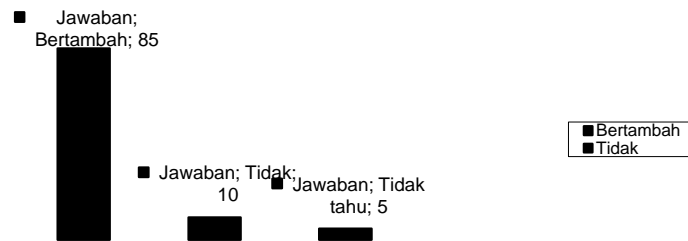
Hasil pemberdayaan bisa diukur dengan sejumlah indikator. Sebagaimana pernah ditegaskan sebelumnya, dalam level yang lebih tinggi, meminjam konsep evaluasi pemberdayaan yang dirumuskan Fujikake, terdapat 12 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah program pemberdayaan, yaitu: partisipasi, opini, perubahan kesadaran, tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreatifitas, tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan. Dari seluruh indikator yang dikemukakan tersebut, keberhasilan program pemberdayaan ekonomi BMT Mitra Simalem Al Karomah bisa disimpulkan pada dua kategori besar, yaitu: (1) perkembangan ekonomi nasabah; dan (2) partisipasi nasabah.

1. Perkembangan Ekonomi Nasabah

Untuk mengukur perkembangan ekonomi nasabah secara langsung, penelitian ini melakukan sebuah survei dengan penyebaran kuesioner sederhana melalui partisipasi *marketing* BMT Mitra Simalem Al Karomah untuk melihat dua indikator tersebut. Survei dilakukan pada 100 orang nasabah yang dipilih dengan tiga informasi kunci yang dianggap bisa menjawab keadaan secara umum, yaitu: perbandingan hasil sebelum dan setelah mendapatkan penguatan modal; aset yang dimiliki sebelum dan setelah mendapatkan penguatan modal; dan pengeluaran rata-rata per bulan sebelum dan setelah mendapatkan penguatan modal.

Dalam hal perbandingan hasil yang diperoleh melalui usaha yang dijalankan sebelum dan sesudah mendapatkan penguatan modal dari BMT Mitra Simalem Al Karomah, grafik yang menyatakan bahwa penghasilan bertambah menunjukkan tingkat jawaban signifikan, mencapai 85 persen dengan

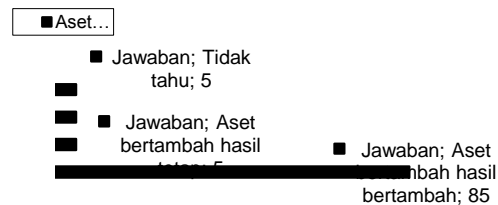
perbandingan jawaban 10 persen tidak bertambah dan 5 persen tidak tahu. Grafik tersebut ditunjukkan pada gambar nomor 5.



Gambar 5 Grafik perkembangan ekonomi responden.

Berdasarkan gambar 5 di atas, bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah yang dilakukan melalui realisasi pembiayaan pada nasabah bisa disimpulkan berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan perbandingan adanya peningkatan penghasilan sebelum mendapatkan penguatan modal dari BMT Mitra Simalem Al Karomah dengan setelahnya.

Kesimpulan ini juga semakin menguat dengan persentase yang cukup besar ketika diajukan pertanyaan tentang perbandingan aset yang dimiliki sebelum dan sesudah mendapatkan penguatan modal dari BMT Mitra Simalem Al Karomah. Grafik persentase jawaban dari pertanyaan tersebut ditunjukkan melalui gambar 6.



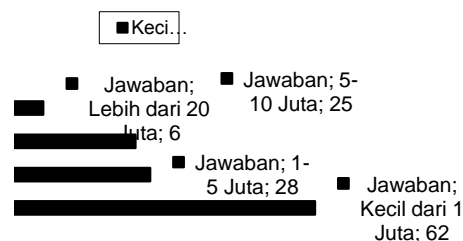
Gambar 6 Grafik perkembangan ekonomi nasabah dari peningkatan aset.

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan melalui gambar 6, bisa dipahami bahwa keadaan ekonomi nasabah meningkat dengan adanya indikator pertambahan aset selain penghasilan yang meningkat. Perbandingan persentase jawaban yang ditunjukkan pada grafik tersebut juga bisa menjawab ketimpangan jawaban sebesar 0,8 persen nasabah yang mengakui bahwa penghasilannya tidak bertambah sebagaimana ditunjukkan pada grafik gambar nomor 40, sebab pada jawaban tentang perkembangan aset yang dimiliki, 0,4 persen antara jawaban hasil tidak meningkat dengan jawaban aset bertambah hasil tidak meningkat.

Berdasarkan selisih ini, bisa diasumsikan telah terjadi ketimpangan jawaban yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman atas pertanyaan yang diajukan.

Sebenarnya, peningkatan perekonomian nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah juga bisa diukur melalui perkembangan tabungan yang disimpan pada BMT Mitra Simalem Al Karomah. Berdasarkan laporan neraca keuangan BMT Mitra Simalem Al Karomah per Desember 2011, diketahui bahwa nominal terkecil nasabah yang menyimpan uangnya pada BMT Mitra Simalem Al Karomah mencapai angka satu juta rupiah, sementara nominal tertinggi yang ditabungkan oleh nasabah mencapai angka seratus juta rupiah. Selain menunjukkan perkembangan ekonominya, disimpannya uang per nasabah hingga mencapai angka seratus juta rupiah tentu saja telah menunjukkan bahwa masyarakat cukup percaya pada BMT Mitra Simalem Al Karomah sebagai lembaga penyimpan uang.

Hasil survei rata-rata simpanan nasabah pada BMT Mitra Simalem Al Karomah menunjukkan bahwa persentase simpanan kecil dari satu juta memiliki grafik yang cukup tinggi dari kalangan nasabah yang menjadi responden penelitian. Secara terinci, jawaban dari survei yang dilakukan terhadap rata-rata simpanan tersebut ditunjukkan melalui grafik pada gambar 7.



Gambar 7 Grafik rata-rata simpanan responden pada BMT Mitra Simalem Al Karomah.

Hasil studi di lapangan juga menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi pembiayaan secara kontinu kepada nasabah. Sejumlah nasabah yang telah berhubungan dengan BMT Mitra Simalem Al Karomah sejak tahun 2004, tercatat telah beberapa kali mendapatkan pembiayaan dari BMT Mitra Simalem Al Karomah dengan jumlah meningkat secara periodik. Sekedar menyebutkan contoh dari sekian banyak nasabah tersebut. Tabel 2 menjelaskan tiga nasabah yang pernah memperoleh pembiayaan selama tiga kali dalam jumlah yang meningkat secara periodik.

Tabel 2. Contoh nasabah yang mendapatkan pembiayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah secara periodik.

No	Nasabah	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman (Rp)		
			Periode I	Periode II	Periode III
1	Erni br. Sinaga	Kerajinan	20.000.000	40.000.000	150.000.000
2	Elviani	Restoran	50.000.000	100.000.000	200.000.000
3	U. Situmorang	Petani	10.000.000	50.000.000	100.000.000

Sumber: Dokumen pembiayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah.

2. Partisipasi Nasabah

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu, partisipasi menjadi komponen penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi pada kenyataannya muncul sebagai dua terminologi yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dalam proses pemberdayaan. Sehubungan dengan keberadaan BMT yang merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi, partisipasi tentu harus dilihat bahwa setiap anggota dalam koperasi menggambarkan rasa memiliki terhadap organisasi dengan diiringi kesadaran kepemilikan sekaligus sebagai nasabah.

Neti Budiwati menyebutkan, partisipasi anggota dalam koperasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengurus dapat menarik minat dan motivasi para anggota untuk merasa memiliki dan membutuhkan koperasi, sehingga anggota akan memberikan partisipasi secara aktif. Dalam hal ini pengurus dituntut untuk mampu menyerasikan usaha/kegiatan koperasi dengan kebutuhan atau permintaan para anggota.

Modal pada BMT Mitra Simalem Al Karomah sendiri diperoleh dari berbagai sumber. Sebagaimana telah dijelaskan pada deskripsi terdahulu, BMT Mitra Simalem Al Karomah pada awalnya terdaftar dengan total aset sebesar Rp 39.250.000,- yang bersumber dari modal sendiri sebesar Rp 3.750.000,- dan modal luar sebesar Rp 35.500.000,-. Saat ini, total aset (termasuk aset yang belum dihitung pada laporan pertanggungjawaban tahun 2011) mencapai angka 20 Milyar. Melihat kondisi ini, sebagai lembaga keuangan yang setingkat dengan koperasi, khususnya di daerah Sumatera Utara, keadaan tersebut menunjukkan

peningkatan signifikan. Tentu saja peningkatan ini hanya mungkin terjadi dengan adanya partisipasi modal dari berbagai nasabah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada deskripsi terdahulu, BMT Mitra Simalem Al Karomah pernah mengalami keterpurukan hingga meninggalkan hutang sebesar 225 juta rupiah. Memang, seperti ditegaskan Hoironi, jumlah nominal hutang dengan nilai tersebut menjadi tidak terlalu memberatkan oleh karena tidak terjadi penarikan massal oleh nasabah yang menitipkan uangnya pada BMT ini. Dalam keadaan demikian, BMT berupaya memberdayakan permodalan dengan cara membuka hubungan kerjasama dengan berbagai *funding*, artinya pemberdayaan modal ini tidak lagi melibatkan masyarakat sebagai pangsa pasar yang kelak akan dijadikan objek pembiayaan, melainkan mengupayakan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat melalui penggalang *funding*. Dengan langkah semacam inilah BMT Mitra Simalem Al Karomah membangun kembali eksistensinya untuk dapat bangkit dari keterpurukan.

Tentu saja, mekanisme permodalan pada BMT Mitra Simalem Al Karomah tidak terlepas dari besarnya simpanan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Di sinilah bentuk partisipasi modal yang diperoleh melalui nasabah bisa dilihat. Partisipasi itu terjadi tentu saja sudah terlebih dahulu dimulai dengan adanya pemberdayaan kepada masyarakat berupa penyadaran akan arti penting BMT Mitra Simalem Al Karomah sebagai pengelola keuangan mereka. Faktanya, BMT Mitra Simalem Al Karomah tidak saja dipercaya oleh umat Islam sebagai lembaga penyimpanan uang, tapi diberikan kepercayaan yang sama pula oleh nasabah Kristen karena kemudahan pelayanan yang diberikannya.

Berdasarkan hasil pembacaan dokumen nasabah simpanan pada BMT Mitra Simalem Al Karomah, pada tahun 2011 tercatat simpanan nasabah dari berbagai bentuk sebesar Rp 8.704.177.225,-. Secara terinci, total simpanan tersebut terkumpul dari berbagai bentuk simpanan sebagaimana dijelaskan melalui tabel 3.

Informasi yang diperoleh dari salah seorang pengurus BMT Mitra Simalem Al Karomah, bapak Irianto, yang menjabat sebagai wakil sekretaris BMT Mitra Simalem Al Karomah, salah satu bentuk kemudahan yang paling kongkrit dari pelayanan yang diberikan BMT Mitra Simalem Al Karomah adalah pelayanan dengan sistem 'jemput bola'. Irianto mencontohkan, kemudahan yang diberikan BMT Mitra Simalem Al Karomah bahkan melampaui pelayanan-

pelayanan yang bisa diberikan oleh bank-bank besar, seperti ketika mereka membutuhkan uang, dalam besaran tertentu nasabah tidak perlu datang untuk mencairkan uang ke BMT, tapi petugas dengan sukarela mengantarkan uang tersebut jika nasabah bersangkutan dalam keadaan mendesak dan tidak punya waktu

Tabel 3 Jumlah Simpanan Nasabah Pada BMT Mitra Simalem Al-Karomah Tahun 2011.

No	Jenis Simpanan	Jumlah
1	Simpanan <i>mudharabah</i>	Rp 7.823.940.958,-
2	Simpanan berjangka	
	Simpanan pendidikan	Rp 326.786.420,-
	Simpanan Idul Fitri	Rp 62.735.975,-
	Simpanan kurban	Rp 35.489.872,-
	Simpanan Ikhtiar Mandiri (SIM)	Rp 124.599.000,-
	Simpanan si buah hati	Rp 48.325.000,-
	Talangan haji	Rp 7.300.000,-
3	Deposito	
	Deposito <i>mudharabah</i> 6 bulan	Rp 245.000.000,-
	Deposito <i>mudharabah</i> 12 bulan	Rp 30.000.000,-
	Total	Rp 8.704.177.225,-

Bentuk partisipasi simpanan nasabah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: simpanan *mudharabah*, simpanan *mudharabah* berjangka, simpanan kurban, simpanan pendidikan, simpanan haji dan simpanan Idul Fitri. Simpanan *mudharabah* bisa dipahami sebagai simpanan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam hal ini BMT Mitra Simalem Al Karomah mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan BMT sesuai perbandingan bagi hasil atau *nisbah* yang disepakati bersama pada saat akad. Perbedaan simpanan *mudharabah* biasa dengan *mudharabah* berjangka hanya terletak pada persoalan prosedur dan waktu pengambilannya saja. Dalam hal ini, simpanan *mudharabah* berjangka bisa disamakan dengan sistem deposito di mana investasi hanya bisa diambil pada waktu-waktu secara berkala yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Sementara itu, simpanan kurban, pendidikan, haji dan Idul Fitri pada BMT Mitra Simalem Al Karomah merupakan simpanan dalam bentuk lainnya yang juga tetap menekankan prinsip-prinsip syariah. Kecuali simpanan *mudharabah* yang tidak dalam status jaminan pembiayaan dan simpanan wajib, simpanan-simpanan ini tidak bisa ditarik secara bebas. Prosedur penarikan simpanan tersebut dijelaskan melalui tabel nomor 17 di bawah ini.

Tabel 4 Prosedur penarikan beberapa jenis simpanan di BMT Mitra Simalem Al Karomah. SOP BMT Mitra Simalem Al Karomah.

Jenis	Prosedur
Simpanan pendidikan	Ditarik dalam waktu enam bulan sekali atau dengan masa rentang yang telah ditetapkan; Rentang waktu ditetapkan pada: (1) awal Juni s/d akhir Juli; dan (2) awal Desember dan akhir Januari; Jika pemilik meninggal dunia, penarikan dilakukan ahli waris yang terdapat di akad awal.
Simpanan berjangka	Ditetapkan pada waktu yang telah disepakati; Bisa ditarik dengan ketentuan pemilik tabungan meninggal dunia.
Simpanan kurban	Penarikan dapat dilakukan 10 hari sebelum Idul Adha.
Simpanan Idul Fitri	Penarikan dapat dilakukan 20 hari sebelum Idul Fitri.

Dalam hal keuntungan yang bisa diperoleh nasabah terkait simpanannya, BMT Mitra Simalem Al Karomah menerapkan sistem yang relatif sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu sistem bagi hasil. Namun demikian, persoalan yang seringkali muncul—sehingga Hoironi Hasibuan menyebutkan kondisi ini sebagai syariah tidak murni—adalah ketidaksiapan nasabah untuk ‘bagi rugi’. Padahal, logika yang tepat semestinya ketika sebuah akad dilakukan untuk kesepakatan yang sama dalam hal bagi hasil, maka semestinya akan *include* secara otomatis kesiapan ‘bagi rugi’ karena tidak selamanya usaha yang dijalankan mendapatkan hasil.

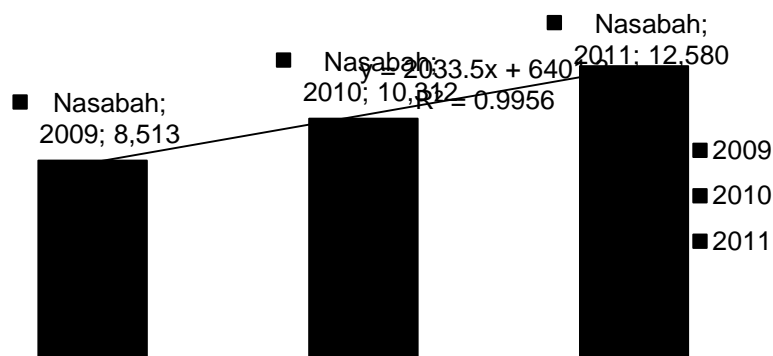
Partisipasi nasabah juga ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan nasabah setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Mitra

Simalem Al Karomah, tampak bahwa nasabah sejak tiga tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20-an persen. Perbandingan jumlah nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah sepanjang sejak tiga tahun terakhir (2009-2011) bisa dijelaskan melalui tabel nomor 18 di bawah ini.

Tabel 5 Perkembangan nasabah selama tiga tahun (2009-2011). Data nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah tahun 2011.

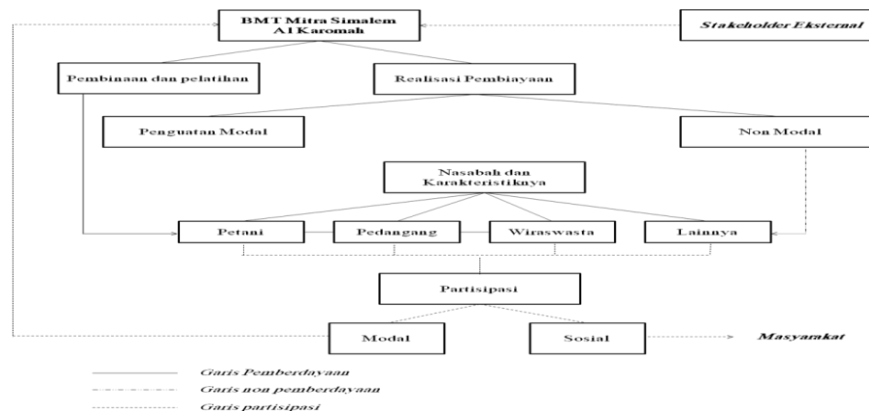
	Tahun		
	2009	2010	2011
Jumlah Nasabah	8.513 orang	10.312 orang	12.580 orang

Melalui data yang disajikan pada tabel nomor 18, bisa dilihat terjadinya pertambahan jumlah nasabah 1.799 orang atau peningkatan sebesar 21,13 persen pada tahun 2009-2010, sementara pada tahun 2010-2011 terjadi penambahan nasabah 2.268 orang atau peningkatan sebesar 21,99 persen. Grafik pertumbuhan nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah sejak tahun 2009-2011 ini bisa ditunjukkan melalui gambar nomor 45 di bawah ini.



Gambar. 10 Pertumbuhan nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah tahun 2009-2011. Diolah dari data nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah tahun 2011.

Deskripsi-deskripsi terdahulu telah menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah, peningkatan ekonomi nasabah sebagai objek pemberdayaan dan karakteristiknya, hingga partisipasi yang diberikan oleh nasabah sebagai wujud dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi BMT Mitra Simalem Al Karomah. Secara skematik, hubungan komponen-komponen tersebut bisa digambarkan melalui skema sebagaimana ditunjukkan melalui gambar 46 di bawah ini.



Gambar. 11 Skema siklus pemberdayaan dan partisipasi nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah.

Skema di atas menunjukkan bahwa partisipasi pada BMT Mitra Simalem Al Karomah sesungguhnya terjadi akibat adanya pemberdayaan itu sendiri. Namun demikian, sebelum pemberdayaan tersebut dilakukan, BMT Mitra Simalem Al Karomah membutuhkan partisipasi, khususnya partisipasi permodalan, dari *stakeholder* eksternal lainnya. Pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah sendiri difokuskan pada pembiayaan nasabah dengan sistem bagi hasil. Hasil pemberdayaan inilah yang nantinya akan melahirkan partisipasi nasabah kepada BMT Mitra Simalem Al Karomah, terutama terkait partisipasi modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah adalah: (a) pembiayaan, yang meliputi pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *qardh al-hasan*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang lebih banyak dilakukan, sebab minat nasabah terhadap jenis pembiayaan ini jauh lebih besar; (b) pembinaan dilakukan terutama pada nasabah-nasabah yang mengalami permasalahan pengembalian pinjaman (pembiayaan); (c) pelatihan belum menunjukkan upaya pemberdayaan yang maksimal karena bentuk pelatihan yang diselenggarakan masih berorientasi pada pengembangan wawasan nasabah tentang BMT, bukan pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya; dan (d) kegiatan sosial yang dilakukan BMT Mitra Simalem Al Karomah tanpa sadar telah menyentuh aspek dakwah dan menjadi salah satu unsur

yang membuat BMT Mitra Simalem Al Karomah cukup populer di tengah masyarakat luas, khususnya di Kecamatan Berastagi dan Kabanjahe.

Hasil pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dilihat melalui dua indikator, yaitu: (a) perkembangan ekonomi nasabah; dan (b) partisipasi nasabah. Dari sisi perkembangan ekonomi bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan BMT Mitra Simalem Al Karomah cukup berhasil dengan semakin meningkatnya pendapatan nasabah jika dibandingkan dengan keadaannya sebelum menjadi nasabah pada BMT ini. Selain itu, perkembangan ekonomi juga bisa dilihat dari meningkatnya taraf pendidikan anggota keluarga nasabah. Sedangkan pada aspek partisipasi, nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah turut memperkuat keberadaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dengan mempercayakan pengelolaan keuangannya pada BMT ini.

Daftar Pustaka

- Ariff, Mohammed. (1988). "Islamic Banking", *Asian Pacific Economic Literature*, Vol. 2, No. 2, September 1988
- BPS. Kab. Karo. (2011). *Kabupaten Karo dalam Angka 2011*. Berastagi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.
- Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa (Mulai dari Belakang)*. Jakarta: LP3ES.
- Clutterbuck, David and Kernaghan, Susan. (1999). *The Power of Empowerment: Release the Hidden Talents of Your Employees*. London: Kogan Page.
- Cook, Sarah dan Macaulay, Stave. (1996). *Perfect Empowerment*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Faturrochman. et.al. (2007). *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Freidmeann. (1993). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publisher.
- Fujikake, Yoko. (2008). Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment, in *Japanese Journal of Evaluation Studies*. Vol. 8, No. 2, 2008.
- Jary, David and Jary, Julia. (1991). *Dictionary of Sociology*. Glasgow: HarperCollins Publishers.

- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1999). *Reformasi Sistem Ekonomi, dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasution, Burhanuddin dan Arief, M. (2005). *Modal Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan (Isu-isu Kelautan dan Kemiskinan hingga Bajak Laut)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perwataatmadja, Karnaen. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami,.
- Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2004). *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Su'ud, Achmad. (2007). "Akses dan Proteksi untuk Masyarakat Miskin terhadap Modal", dalam Siti Sarah Mawahidah dan Zakkiyudin Baidhowi, *Islam, Good Governance dan Pengentasan Kemiskinan: Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal*. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Umar, Husein. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.